

**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya keseragaman dan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sidoarjo serta agar dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur, perlu adanya peraturan penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.

6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propem Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda dan rancangan perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.
19. Keputusan Bupati adalah norma hukum yang dikeluarkan oleh Bupati yang bersifat konkret, individual dan final.
20. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

21. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan perda.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
  - a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Perda;
  - b. Perbup;
  - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
  - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
  - a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan DPRD;
  - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk produk hukum daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Pembentukan Perda

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propem Perda.
- (2) Propem Perda bertujuan:
  - a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
  - b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

## Pasal 4

- (1) Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

## Pasal 5

- (1) Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penetapan Propem Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propem Perda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

Penyusunan Propem Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 6

- (1) Penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan usulan Propem Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 7

Penyusunan Propem Perda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan :

- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.

## Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapem Perda melalui Pimpinan DPRD.

## Paragraf 3

## Penyusunan Propem Perda di Lingkungan DPRD

## Pasal 9

- (1) Penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapem Perda.
- (2) Penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapem Perda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapem Perda menyampaikan usulan Propem Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

## Paragraf 4

## Penetapan Propem Perda

## Pasal 10

- (1) Penyusunan Propem Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapem Perda.
- (2) Bapem Perda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propem Perda berdasarkan hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propem Perda.
- (4) Bapem Perda menyampaikan Propem Perda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propem Perda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## Paragraf 5

## Pelaksanaan Propem Perda

## Pasal 11

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propem Perda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propem Perda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propem Perda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propem Perda paling cepat 1 (satu) tahun setelah Rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propem Perda.

- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

Paragraf 6  
Propem Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 12

- (1) Dalam Propem Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propem Perda ditetapkan;
  - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan/ atau
  - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propem Perda, antara lain:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapem Perda Perda dan Bagian Hukum, dengan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Bagian Kedua  
Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta ayat (3) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu  
Penyusunan Perda

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propem Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD.

Paragraf 2  
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah  
Akademik

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
  - a. APBD;
  - b. pencabutan Perda; atau
  - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. pokok pikiran; dan
  - b. materi muatan yang diatur.
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD menyusun penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapem Perda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Paragraf 3  
Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propem Perda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pengusul.

Pasal 22

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan/atau ketertiban umum, Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diberi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pengusul untuk dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pengusul.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan Rancangan Perda hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk :
  - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
    1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
    2. tata bahasa.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

## Pasal 25

Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati.

## Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

## Paragraf 4

## Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

## Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapem Perda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

## Pasal 28

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Bapem Perda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

#### Pasal 29

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapem Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

#### Pasal 30

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), bertujuan untuk:
  - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda.
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
    1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
    2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan, peneliti dan/ atau tim ahli atau kelompok pakar.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1), Bapem Perda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapem Perda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapem Perda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapem Perda melalui pimpinan DPRD.

#### Pasal 32

- (1) Bapem Perda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Bapem Perda dan Pengusul/ Perwakilan Pengusul/ Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan:
  - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
  - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
  - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
  - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. pimpinan fraksi;
  - b. pimpinan komisi; dan
  - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 35

- (1) Dalam rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapem Perda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
  - a. pimpinan fraksi;
  - b. pimpinan komisi; dan
  - c. seluruh anggota DPRD.

#### Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

#### Pasal 38

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Bupati.

Paragraf 5  
Persandingan Rancangan Perda

Pasal 39

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 40

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilakukan pengkajian oleh Bapem Perda berdasarkan pertimbangan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pengkajian Bapem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapem Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengkajian Bapem Perda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapem Perda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Paragraf 6  
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati, dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dalam Rapat Panitia Khusus.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati, dilakukan dengan:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/ atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD, dilakukan dengan:
1. penjelasan dari pemrakarsa dari unsur anggota, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan badan pembentuk perda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Rancangan Perda yang telah selesai dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Pansus, Bapem Perda bersama Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (5) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat serta tidak dapat mengubah materi muatan rancangan Perda.
- (6) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c; dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
  - b. pendapat akhir/sambutan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### Pasal 43

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 45

Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Penetapan

#### Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 47

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

#### Pasal 48

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.

## Pasal 49

- (1) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.

## Bagian Kedua

## Penyusunan Perbup dan Peraturan Bersama

## Pasal 50

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Perbup dan Peraturan Bersama.
- (2) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

## Pasal 51

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup dan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perbup dan Peraturan Bersama kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 52

- (1) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.

## Pasal 53

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup dan Peraturan Bersama yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, dan Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup dan Peraturan Bersama hasil penyempurnaan yang telah diparaf kepada Bupati untuk ditandatangani.

## Bagian Ketiga

## Penyusunan Peraturan DPRD

## Pasal 54

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
  - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 55

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. tata kerja anggota DPRD;
    3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  7. kewajiban anggota DPRD;
  8. larangan bagi anggota DPRD;
  9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    - 1) sidang verifikasi;
    - 2) pembuktian;
    - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    - 4) alat bukti; dan
    - 5) pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

#### Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapem Perda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
  - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas, dilakukan penyesuaian akhir oleh Bapem Perda.

- (6) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Peraturan DPRD.
- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 57

Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

### Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Bupati

#### Pasal 58

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dan dapat mengikutsertakan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, dan Sekretaris Daerah, serta disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

### Bagian Kelima Penyusunan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 59

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

## Pasal 60

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

## Pasal 61

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

## Pasal 62

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

## Pasal 63

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

## Pasal 64

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

## Pasal 65

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## BAB V

## PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

## Pasal 66

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perda, Peraturan Bersama, dan Peraturan DPRD, dibuat dalam rangkap 4 (empat);
  - b. Perbup, Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, dan Peraturan Bersama;
  - b. Sekretariat DPRD untuk Perda, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
  - c. Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa untuk Keputusan Bupati.

## Pasal 67

Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

## Pasal 68

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendelegasian kewenangan penandatanganan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 69

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
  - a. Perda, Perbup, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan

- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
  - (3) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Pasal 70

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Perbup, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Perbup, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 73

Pengundangan Perda, Perbup, Peraturan Bersama, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 74

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 75

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

### BAB VI EVALUASI DAN KLARIFIKASI

#### Bagian Kesatu Evaluasi Raperda

#### Pasal 76

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk memperoleh evaluasi dan nomor register.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - c. pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. rencana tata ruang daerah; dan
  - e. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/ atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Dalam hal Bupati juga menyampaikan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, disertai paraf koordinasi.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan salah satu alat kelengkapan DPRD dan disampaikan dengan menyertakan *soft copy* Rancangan Perda.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi serta telah diberikan nomor register, Bupati menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.

- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapem Perda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Bupati menyampaikan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

#### Pasal 78

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

#### Bagian Kedua

#### Klarifikasi Perda dan Perbup

#### Pasal 79

- (1) Setelah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bupati menetapkan rancangan Perda dengan memberikan nomor Perda dan tanda tangan kemudian disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk memperoleh klarifikasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Perda yang sudah dilakukan evaluasi.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal Gubernur membatalkan Perda dan/atau Perbup, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pembatalan, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan/atau Perbup dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda dan/atau Perbup diterima.

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan seluruhnya, maka Perda dan/atau Perbup tetap dijalankan.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan sebagian, maka Bupati atau DPRD mengajukan rancangan perubahan Perda dan Bupati melakukan perubahan Perbup untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Rancangan perubahan Perda dan/atau Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas sesuai dengan Perda ini.
- (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak seluruhnya oleh Menteri Dalam Negeri, maka Bupati dan DPRD melakukan pencabutan terhadap Perda serta Bupati melakukan pencabutan terhadap Perbup tersebut.

### Bagian Ketiga Klarifikasi Peraturan DPRD

#### Pasal 81

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Gubernur membatalkan Peraturan DPRD, maka DPRD melakukan pencabutan terhadap Peraturan DPRD tersebut.

## BAB VII PENYEBARLUASAN

#### Pasal 82

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propem Perda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 83

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan pembentuk perda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 84

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 85

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

## Pasal 86

- (1) Dalam hal Perda, Perbup, dan Peraturan Bersama mengatur hal yang berdampak luas terhadap masyarakat terutama mengenai pengenaan tarif, Bupati dapat menunda pemberlakuan Perda, Perbup, dan Peraturan Bersama dimaksud dari tanggal diundangkan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.

## BAB VIII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 87

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup dan/ atau Peraturan Bersama.
- (2) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/ atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup dan/atau Peraturan Bersama harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) DPRD dan Bupati memberikan kesempatan dan/atau akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 88

- (1) Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dan penyebarluasannya.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menggunakan nomor seri dan/ atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Perbup, Peraturan Bersama, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 90

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/ atau bentuk Keputusan Kepala SKPD, Keputusan Direktur BUMD, dan keputusan kepala instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD, mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 16 Juni 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR :  
155-5/2015

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM.

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan proses pembuatan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD, yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan dan penyebarluasan untuk produk yang berbentuk peraturan. Tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam penyusunan Produk Hukum Daerah. Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan agar Produk Hukum Daerah yang diterbitkan menjadi berdaya guna dan berhasil guna serta mengikat secara hukum kepada masyarakat dan tujuan filosofis keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan dapat tercapai.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bentuk Produk Hukum Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, bentuk dan tata cara pengisian Program Pembentukan Perda, serta teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propem Perda.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Propem Perda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Propem Perda.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Jika penetapan pembahas dari DPRD ditetapkan berdasarkan komisi, maka penetapan pembahas dari DPRD dilakukan dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam penyelarasan akhir, Pansus atau Bapem Perda dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan atau ahli hukum dalam bidang peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas

- Pasal 77  
Cukup jelas
- Pasal 78  
Cukup jelas
- Pasal 79  
Cukup jelas
- Pasal 80  
Cukup jelas
- Pasal 81  
Cukup jelas
- Pasal 82  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Perda dan rancangan Perda yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Perda tersebut atau memahami Perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan tersebut dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 83  
Cukup jelas
- Pasal 84  
Cukup jelas
- Pasal 85  
Cukup jelas
- Pasal 86  
Cukup jelas
- Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Termasuk dalam kelompok orang antara lain: kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 88  
Cukup jelas
- Pasal 89  
Cukup jelas
- Pasal 90  
Cukup jelas
- Pasal 91  
Cukup jelas
- Pasal 92  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Cukup jelas

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

a. BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. Bentuk Peraturan Daerah



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal ...

BUPATI SIDOARJO,

tanda tangan  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

tanda tangan  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA....., NAMA PROVINSI .... :  
(NOMOR URUT PERDA/ TAHUN)

2. Bentuk Peraturan Bupati



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal

BUPATI SIDOARJO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

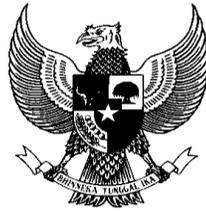
Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ... NOMOR ...

## 3. Bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah

**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BERSAMA BUPATI SIDOARJO DAN  
 BUPATI/ WALIKOTA. .. (Nama Kabupaten/Kota)  
 NOMOR ... T AHUN ...  
 NOMOR ... T AHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO DAN  
 BUPATI /WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) ,

Menimbang: a. bahwa ...;  
 b. bahwa ...;  
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
 2. ...;  
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA BUPATI SIDOARJO DAN  
 BUPATI/WALIKOTA..... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG  
 ..... (Judul Peraturan) Bersama).

BAB I  
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ....

Pasal ....

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Berita Daerah Kabupaten/Kota .... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ....

pada tanggal

BUPATI SIDOARJO,

BUPATI/ WALI KOTA...., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal .....

Diundangkan di ....

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)

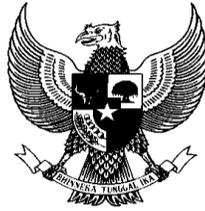
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA .... (Nama Kab/ Kota)

4. Bentuk Peraturan DPRD



**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KETUA DPRD KABUPATEN SIDOARJO,  
(ATAU WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN SIDOARJO)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

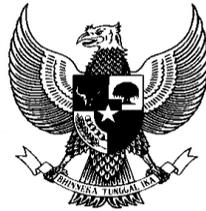
Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ... NOMOR ...

## 5. Bentuk Keputusan Bupati



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR ... T AHUN ....  
TENTANG  
(Judul)

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;

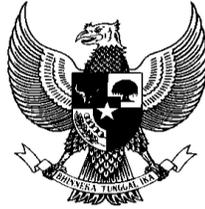
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESAT U :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA :

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal

BUPATI SIDOARJO,  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

## 6. Bentuk Keputusan DPRD

**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 (Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa.....;  
 b. bahwa.....;  
 c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dan seterusnya...;  
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

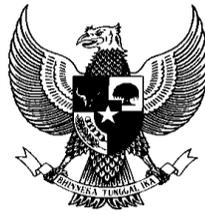
Menetapkan :  
 KESATU :  
 KEDUA :  
 KETIGA :  
 KEEMPAT :  
 KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD  
 KABUPATEN SIDOARJO

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

## 7. Bentuk Keputusan Pimpinan DPRD

**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 (Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa.....;  
 b. bahwa.....;  
 c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dan seterusnya....;

Memperhatikan : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dan seterusnya.....;  
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU :  
 KEDUA :  
 KETIGA :  
 KEEMPAT :  
 KELIMA :

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD  
 KABUPATEN SIDOARJO

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

## 8. Bentuk Keputusan Badan Kehormatan DPRD

**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO  
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
 (Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa.....;  
 b. bahwa.....;  
 c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. dan seterusnya.....;  
 (jika diperlukan)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
 KESATU :  
 KEDUA :  
 KETIGA :  
 KEEMPAT :  
 KELIMA :

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....  
 KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD  
 KABUPATEN SIDOARJO

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)





- Kolom 5 Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD baru  
 Kolom 6 Penyusunan perubahan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD  
 Kolom 7 Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi  
 Kolom 8 Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD  
 Kolom 9 Tahun penyelesaian Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD  
 Kolom 10 Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD.

### c. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

##### A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

## C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH